PENGARUH SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Periode 2011-2015)

THE INFLUENCE OF VAT PERIODIC TAX RETURN AND TAX COLLECTION LETTER ON VALUE ADDED TAX REVENUE
(*Case Study at Tax Service Offices Pratama Sumedang Period 2011-2015*)

Pembimbing:
Lilis Puspitawati,SE.,M.Si.,Ak,CA

Oleh:
Nabila Awliarahman
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Email: nabilaarh@yahoo.com

ABSTRACT

This research was conducted on Tax Service Office Pratama Sumedang, a VAT periodic tax return and tax collection letter is one of the factors that affect the acceptance of the value added tax revenue. A phenomenon that occurs in the study on when quantity of VAT periodic tax return is increase but value-added tax revenue is coming down and when the tax collection letter is increase its doesn't work to value-added tax revenue following to up.

The purpose of this study was to determine the influence of the notice period of the VAT periodic tax return and tax collection letter on Tax Service Office Pratama Sumedang. In this research using descriptive and verification method with quantitative approach. The test statistic used is multiple linear regression analysis, correlation analysis and analysis of the determinant coefficient.

The population in this study is the amount of the VAT periodic tax return was reported, the amount of tax collection letter and the amount of value added tax revenue on Tax Service Office Pratama Sumedang period 2011-2015. And the sampling using saturation sampling technique where all the population sampled.

The results of this study partially show the positive influence of the VAT periodic tax return on VAT revenue and the positive influence of tax collection letter on VAT revenue.

***Keywords**: VAT Periodic Tax Return, Tax Collection Letter, Value Added Tax Revenue*

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat berkaitan dengan kewajiban perpajakannya, jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang, dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah (Siti Kurnia Rahayu, 2010:23). Penerimaan pajak merupakan

pelaksanaan pemerintah di negara manapun hanya dapat dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung yaitu tersedianya dana, guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal (Siti Kurnia Rahayu, 2010:52). Sumber dana tersebut salah satunya dari pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya penerimaan negara terdiri atas penerimaan pajak dan bukan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010**:**53).

Peranan pajak dalam penerimaan negara semakin besar terbukti dari adanya penerimaan yang berasal dari pajak hampir mencapai 80% yang membawa konsekuensi realisasi penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2015:1)**.**

Dalam penerapan sistem akuntansi berkomputer, kualitas pengguna harus diselaraskan dengan sistem yang akan diterapkan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan (Lilis Puspitawati, 2010:251).

Di Indonesia pajak memiliki lembaga berdasarkan pemungutannya yaitu ada pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai pen gerluaran negara. Salah satunya pajak pusat yang dipungut oleh negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (Rismawati dan Antong 2015:276).

Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pajak yang dipungut yaitu pajak atas konsumsi dalam negeri artinya hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi didalam Daerah Pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan prinsip tempat yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi (Untung Sukardji, 2015:12).

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai salah satunya adalah dari SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh wajib pajak karena penerimaan pajak pertambahan nilai yang terutang oleh wajib pajak bisa dilihat dari surat pemberitahuan yang diserahkan kepada KPP setempat. Salah satunya yaitu dari SPT Masa PPN yang diberikan, SPT Masa PPN adalah sarana bagi pengusaha kena pajak untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang sebenarnya (Rimsky K, 2015:66).

Dan demikian dengan Surat Tagihan Pajak, Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak bagi wajib pajak yang belum benar membayar jumlah pajak terutangnya. Sesuai definisnya Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda (Agus Suharsono, 2011:164) dan juga sesuai fungsi dari Surat Tagihan Pajak yaitu sebagai suatu koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak (Rismawati dan Antong, 2015: 39).

Adapun menurut Silvia N (2015) yang menunjukan bahwa secara variabel SPT Masa PPN memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan PPN. Namun menurut Yessy Izzatun (2014) hasil pengujian secara parsial membuktikan SPT masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Dan menurut Dedy Setya (2014) menunjukan bahwa STP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan, namun menurut Nadian K (2015) STP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Penelitian pada KPP Pratama Sumedang Periode 2011-2015"**

1.2 Rumusan Masalah

Penulis akan mengambil beberapa rumusan masalah yang akan diteliti didasarkan atas pembahasan diatas, rumusan masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2. Seberapa besar pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan penelitian masalah yang telah dirumuskan di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan dengan maksud mendapatkan data yang akurat dan relevan berkaitan dengan Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada Surat Pemberitahuan Masa PPN, Surat Tagihan Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan maka fenomena penerimaan pajak pertambahan nilai dapat dipengaruhi melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Surat Pemberitahuan Masa PPN

Pengertian dari SPT Masa PPN menurut Yustinus, dkk. (2011:40) mengemukakan bahwa:

"Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah surat yang digunakan oleh pengusaha kena pajak (PKP) untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang"

Dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari menurut Ferra Pujiyanti (2015:43) dalam bukunya yang menyatakan:

"PPN dan PPnBM yang terutang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat, selambat-lambatnya 20hari setelah masa pajak berakhir"

2.1.2 Surat Tagihan Pajak

Pengertian surat tagihan pajak menurut Rismawati dan Antong (2015: 38) adalah:

"Surat Tagihan Pajak adalah surat yang dilakukan untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi dan menegaskan bahwa surat tagihan pajak sebagai suatu koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP) adalah sebagai berikut:

"Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak dalam penagihan pajak yang tercantum dalam STP, dapat juga dilakukan penagihan dengan Surat Paksa (UU No. 19/ 1990)".

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Timbul H dan Mukhlis Imam (2012:28) definisi penerimaan pajak adalah :

"Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi negara dan merupakan komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan dan pembangunan bagi negara."

Dan menurut Rismawati dan Antong (2015:276) pengertian pajak pertambahan nilai itu sendiri adalah :

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Penjualan atau penyerahan barang yang telah diolah atau diproses sehingga dari sifat atau bentuk aslinya menjadi barang baru yang bertambah nilai atau daya gunanya dikenakan PPN."

Dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Haula Rosdiana dan Edi Irianto (2011:1) berkata bahwa:

"Efektifnya pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak akan sangat mempengaruhi penerimaan negara."

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Djuanda dan Irwansyah Lubis (2011:57) mengemukakan bahwa:

"Setiap wajib pajak (PKP) yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara."

2.2.2 Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014: 168) mengemukakan bahwa:

"Salah satu ujung tombak dari penerimaan pajak adalah hasil dari penagihan pajak yang dilakukan oleh aparat seksi penagihan pajak dengan surat tagihan pajak maupun dengan surat paksa."

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara sebagai berikut:

H1: Surat Pemberitahuan Masa PPN berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H2: Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif sendiri di definisikan oleh Suharismi Arikunto (2013:174):

"Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian."

Metode verifikatif menurut Sugiyono (2015:13) menjelaskan bahwa:

"Metode verivikatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan."

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

3.2 Operasinalisasi Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31) , operasionalisasi variable adalah sebagai berikut :
"Operasionalisasi variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct,* sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik".

Kemudian Suharsimi Arikunto (2013:164) menjelaskan bahwa pemecahan variabel menjadi sub-variabel disebut dengan kategorisasi, yaitu memecah variabel menjadi kategori-kategori data yang harus dikumpulkan oleh peneliti. Kategori-kategori yang tadi dijelaskan bisa diartikan sebagai indikator. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, dapat dikatakan bahwa operasionalisasi variabel yaitu suatu cara untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi variabel menjadi sub-variabel yang bisa dijadikan sebagai indikator dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Variabel Independen (X_1)
   Menurut Deni Darmawan (2013:109) variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independent X_1 dalam penelitian ini adalah surat pemberitahuan masa PPN yang diukur dari jumlah SPT masa PPN yang dilaporkan oleh wajib pajak.

2. Variabel Independen (X_2)
   Menurut Deni Darmawan (2013:109) variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independent X_2 dalam penelitian ini adalah variabel surat tagihan pajak yang diukur dari jumlah surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh fiskus.

3. Variabel Dependen (Y)
   Menurut Deni Darmawan (2013:109) variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependent Y dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pertambahan nilai yang diukur dengan melihat realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sugiyono (2015:137) menyatakan bahwa sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Andi Supangat (2010:2) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (responden) maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk keperluannya sendiri. Kemudian Tony Wijaya (2013:19) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap dipakai. Data sekunder mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan meskipun dapat diolah lebih lanjut.

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai "Pengaruh surat pemberitahuan masa PPN dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai" adalah data sekunder. Sedangkan berdasarkan sifatnya peneliti menggunakan data kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2015:137), data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan. Dan definisi data kuantitatif menurut Sugiyono (2015:7) adalah data penelitian berupa angka-amgka dan analisis menggunakan statistik..

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2012:308) Data sekunder merupakan data sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,misalnya lewat dokumen atau orang lain. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan SPT masa PPN, laporan penerbitan surat tagihan pajak dan data realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai yang diperoleh dari KPP Pratama Sumedang.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012: 62) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)
   Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menelaah *text book* yang ada di perpustakaan ataupun milik pribadi. Data lainnya pun diperoleh dari jurnal terkait serta dari website yang ada seperti www.pajak.go.id
2. Studi Lapangan (*Field Research*)
   a) Observasi : Pengamatan ini dilakukan dengan mendatangi langsung KPP Pratama Sumedang untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti terkait judul yang diteliti.
   b) Dokumentasi : Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2015:80) pengertian Populasi adalah sebagai berikut:
"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

Berdasarkan pengertian diatas, populasi merupakan obyek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Maka populasi dalam penelitian ini adalah data-data berupa laporan jumlah Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan, jumlah Surat Tagihan Pajak PPN yang diterbitkan dan laporan jumlah realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai selama 5 periode (2011-2015) dalam hitungan bulan yaitu Januari-Desember di KPP Pratama Sumedang.

3.4.2 Penarikan Sampel

Menurut Tony Wijaya (2013:27) sampel adalah:

"Bagian dari populasi yang diambil/ditentukan berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu. Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampling yang tepat".

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sampling Jenuh. Pengertian Sampling Jenuh menurut Sugiyono (2015:81) adalah sebagai berikut:

*"*Sampling Jenuh adalah teknik penentuan data sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.*"*

Menurut (Uma Sekaran, 2011:136) memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel, yaitu sebagai berikut :

"Dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel adalah 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian dan untuk ukuran sampel minimum adalah 30 yang dipecah ke dalam subsampel adalah tepat untuk kebanyakan penelitian".

Sampel dalam penelitian ini adalah data-data berupa laporan jumlah Surat Pemberitahuan masa PPN yang dilaporkan, jumlah Surat Tagihan Pajak PPN yang diterbitkan dan laporan jumlah realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai selama 5 periode (2011-2015) dalam hitungan bulan yaitu Januari-Desember. di KPP Pratama Bandung Sumedang.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.3.1 Tempat Penelitian

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka Penulis melakukan penelitian pada KPP Pratama Sumedang yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I yang beralamat di Jl. H.Ibrahim Adjie (Kiaracondong) Nomor 372, Bandung.

3.4.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan dimulai dari Febuari 2016 sampai dengan Agustus 2016.

3.5 Metode Pengujian Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh penulis merupakan data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain, maka metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengujian Asumsi Klasik.

Didalam penggunaan analisis linier berganda, diperlukan beberapa pengujian asumsi klasik. Beberapa asumsi klasik regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression*) sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi.

3.6 Rancangan Analisis

3.6.1 Rancangan Analisis

Menurut Umi Narimawati (2010:41) mendefinisikan rancangan analisis adalah sebagai berikut:

"Rancangan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".

Analisis yang penulis gunakan terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan meode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitaif.

Menurut Sugiyono (2015:7) mendefinisikan analisis kuantitaif sebagai berikut:

> "Analisis kuantitatif merupakan metode analisis yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang tekah ditetapkan".

Adapun langkah-langkah analisis kuantitaif yang diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1) Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple*)

Menurut Sugiyono (2011:277) mendefinisikan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

> "Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua".

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2).

2) Analisis Korelasi *Pearson*

Analisis kolerasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Kolerasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Yang dimaksud analisis kolerasi *pearson* menurut Nanang Martono (2014:214) adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif (uji hubungan) dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio.

3) Analisis Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh Surat Pemberitahaun Masa PPN (X1) dan Surat Tagihan Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) dapat diketahui dengan menggunakan analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya.

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:64) mendefinisikan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Rancangan pengujian hipotesis dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_o) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (H_a) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independen yaitu Surat Pemberitahaun Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Namun karena sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, sehingga menurut Sugiyono (2014:64) menyatakan bahwa jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik, yang ada hanya hipotesis penelitian dan dalam pembuktiannya tidak ada istilah signifikansi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis dan jenis data yang dikumpulkan maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah rata-rata, maksimum dan minimum dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan masing-masing variabel pada KPP Pratama Sumedang periode tahun 2010-2015, sedangkan analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh SPT masa PPN (X1) dan Surat Tagihan Pajak (X2) terhadap Penerimaan PPN(Y)

4.1.1 Analisis Deskriptif

Perolehan dari data kuantitatif akan dipaparkan sebagai variabel-variabel terkait dalam penelitian. Data kuantitatif diperoleh berdasarkan variabel dan skala pengukuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Data-data yang telah tersedia akan disajikan dalam bentuk tabel deskriptif statistik agar mempermudahkan dalam menjelaskan hasil penelitian.

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Surat Pemberitahuan Masa PPN (X_1)

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dilakukan pada analisis deskriptif rata-rata rata niai SPT masa PPN selama tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif yaitu peningkatan dan penurunan dari bulan ke bulan, namun ada beberapa bulan yang selalu naik dari bulan ke bulannya. SPT masa PPN bisa meningkat ketika wajib pajak selalu melaporkan SPT masa PPNnya secara benar dan rutin dari bulan ke bulannya.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Surat Tagihan Pajak (X_2)

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dilakukan pada analisis deskriptif rata-rata rata niai STP PPN selama tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif yaitu peningkatan dan penurunan dari bulan ke bulan, bahkan ada beberapa bulan KPP Pratama Sumedang bagian penagihan tidak menerbitkan STP PPNnya, dan ada beberapa bulan yang selalu naik dari bulan ke bulannya. STP PPN bisa meningkat ketika wajib pajak kurang bayar atau bahkan tidak membayar pajak terutangnya dalam satu masa tertentu.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Penerimaan PPN terendah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang periode 2011 – 2015 berada pada bulan Januari tahun 2011, dan sebaliknya nilai tertinggi Penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang periode 2011 – 2015 berada pada bulan Desember 2015.

4.1.2 Analisis Verifikarif

Menurut Sugiyono (2015:13) menjelaskan bahwa metode verifikatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

4.1.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Agar memenuhi kaidah BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) maka regresi sederhana harus memenuhi uji prasyarat análisis yang disebut dengan uji asumsi klasik. Dari hasil analisis uji normalitas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-talled) berada diangka 0.335, yang berarti nilai probabilitas >0,05 dan dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Dan dari hasil output VIF hitung dari kedua variabel = 1.049 < VIF = 10 dapat disimpulkan bahwa antara

variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan tabel scatterplot, data yang digunakan tidak terjadi heterokedastisitas. Hal tersebut terjadi karena data tidak memiliki pola khusus atau memiliki pola acak . Dan berdasarkan uji autokorelasi diperoleh nilai d sebesar 1,760. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai d_L dan d_U pada tabel Durbin-Watson. Untuk α=0.05, k=2 dan n=60, diperoleh $d_{L=}$ 1,5144 dan $d_{U=}$ 1,6518. Nilai $d_U < d < 4- d_U$,jadi 1,6518 < 1,760 < 2.3482 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat autokorelasi.

4.1.2.2 Hasil Koefisien Korelasi

Hubungan antara SPT masa PPN terhadap Penerimaan PPN sebesar 0,367, artinya SPT masa PPN memiliki hubungan korelasi rendah dengan Penerimaan PPN. hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,20 hingga 0,399 yang tergolong dalam kategori rendah. Hubungan yang bersifat positif artinya, semakin tinggi wajib pajak melaporkan SPT masa PPN maka Penerimaan PPN akan semakin tinggi. Sedangkan hubungan antara STP PPN terhadap Penerimaan PPN sebesar 0,603, artinya STP PPN memiliki hubungan korelasi yang kuat dengan Penerimaan PPN. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,60 hingga 0,799 yang tergolong dalam kategori cukup tinggi. Hubungan yang bersifat positif artinya, semakin banyak STP PPN yg dikeluarkan maka hal tersebut meningkatkan Penerimaan PPN dan sebaliknya apabila STP PPN rendah maka Penerimaan PPN bernilai rendah.

4.1.2.3 Hasil Koefisien Determinasi

Dari hasil perhitungan untuk nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 0,0910 artinya SPT masa PPN terhadap Penerimaan PPN adalah sebesar 9,10%, sedangkan sisanya yaitu 90,90% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti jumlah PKP, jumlah SSP PPN, STP dan faktor-faktor lain. Dan untuk nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 0,3310 artinya pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN sebesar 33,10%, sedangkan sisanya yaitu 66.9% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti jumlah PKP, jumlah SSP PPN, jumlah SPT masa PPN dan faktor-faktor lain.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN terhadap Penerimaan PPN

Dengan nilai korelasi (r) yang diperoleh antara SPT masa PPN dengan Penerimaan PPN pada KPP Pratama Sumedang adalah sebesar 0,367, ini berarti terdapat hubungan korelasi yang rendah antara SPT masa PPN terhadap Penerimaan PPN. Dengan nilai bertanda positif dan dalam analisis koefisien determinasi didapat nilai koefisien determinasi SPT masa PPN terhadap Penerimaan PPN sebesar 9,10%.

Hasil penelitian juga sesuai dengan landasan teori adapun beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pelaporan surat pemberitahuan menurut Edi Slamet Irianto (2013:109) apabila Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah diberikan kepada KPP ternyata ada kesalahan dalam pengisian SPT diantaranya kesalahan penggunaan formulir, salah pengisian dan/atau tidak lengkap maka KPP meminta untuk melakukan perbaikan SPT agar sesuai dengan ketentuan. Dan agar wajib pajak melakukan perbaikan SPT, bagian Ekstensifikasi yang berusaha memberi masukan dan solusi agar SPT yang wajib pajak sampaikan diisi sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Djuanda dan Irwansyah Lubis (2011:57) bahwa setiap wajib pajak (PKP) yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara.

Hasil penelitian juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa SPT Masa PPN yang dilaporkan memiliki pengaruh yang positif terhadap Penerimaan PPN Christina Trimanda (2013). Namun hal ini tidak sesuai dengan fenomena yang ada, bahwa masih ada wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN namun tidak diisi secara benar bahkan tidak melaporkan PPN yang dipungutnya. Karena di KPP Pratama Sumedang walaupun masih bisa

terjadi fenomena tetapi rasio wajib pajak yang melaporkan SPT masa PPNnya dengan status nihil jauh lebih banyak dengan wajib pajak yang masih kurang bayar.

4.2.2 Pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Dengan nilai korelasi (r) yang diperoleh antara STP PPN dengan Penerimaan PPN pada KPP Pratama Sumedang adalah sebesar 0,603, ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara STP PPN dengan Penerimaan PPN. Dengan hubungan yang bersifat positif dan analisis koefisien determinasi didapat nilai koefisien determinasi STP PPN terhadap Penerimaan PPN sebesar 33,10%.

Hasil penelitian juga sesuai dengan landasan teori terdapat beberapa faktor wajib pajak yang tidak mau membayar pajak biasanya diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dari fiskus kepada wajib pajak yang memiliki hutang pajak, agar wajib pajak lebih taat dalam menjalankan kewajibannya untuk membayarkan hutang pajaknya sehingga tidak mengakibatkan turunnya penerimaan pajak. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011:139) menyatakan bahwa penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak dengan surat tagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara.

Hasil penelitian juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa hasil pengujian tagihan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta (Rizky Yuslam, 2015). Hal ini tidak sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan bahwa masih banyak wajib pajak yang mengacuhkan Surat Tagihan Pajak, karena di KPP Pratama Sumedang walaupun masih terjadinya fenomena dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak kepada wajib pajak, akan meningkatkan Penerimaan PPN. Dalam hal ini artinya wajib pajak masih banyak yang patuh dengan kewajiban membayar tagihan pajaknya.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab I hingga bab IV mengenai pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang periode 2011 hingga 2015, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Masa PPN berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang periode 2011-2015. Artinya, senakin banyaknya wajib pajak yang melapor SPT masa PPNnya akan meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Penurunan penerimaan pajak pertambahn nilai yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang ketika masih ada sejumlah wajib pajak yang telat melaporkan SPT masa PPNnya dan sejumlah wajib pajak masih salah mengisi SPT masa PPNnya sehingga menyebabkan SPT masa PPN yang masih kurang bayar, hal itulah yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai.
2. Surat tagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang periode 2011-2015. Artinya, semakin sering diterbitkannya surat tagihan pajak maka semakin meningkat pula penerimaan pajak pertambahan nilai. Penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang ketika jumlah surat tagihan pajak meningkat terjadi karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak langsung membayar kurang bayar atau hutang pajaknya setelah diterbitkan surat tagihan pajak, sehingga proses penagihan pajak bulan tersebut hanya sebatas menerbitkan surat tagihan pajak dan tidak sampai pencairan tunggakan pajak yang akan mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai..

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Surat Pemberitahuan masa PPN dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Sumedang,. Sesuai dengan teori tersebut maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1) Untuk meningkatkan SPT masa PPN yang dilaporkan oleh Wajib Pajak agar tepat waktu dan tepat dalam pengisian maka disarankan dilakukannya oleh bagian Ekstensifikasi yang berusaha memberi masukan dan solusi agar SPT yang wajib pajak sampaikan diisi sesuai dengan ketentuan..
2) Untuk meningkatkan Surat Tagihan Pajak agar segera melunasi hutang pajaknya maka disarankan dengan dilakukannya penegakan hukum yang lebih tegas dari fiskus kepada wajib pajak yang memiliki hutang pajak, agar wajib pajak lebih taat dalam menjalankan kewajibannya untuk membayarkan hutang pajaknya sehingga tidak mengakibatkan turunnya penerimaan pajak.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan agar peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan metode yang sama tetapi indikator, unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agus Suharsono. 2011 *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Andi Supangat. 2010. *Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Chairil Anwar Pohan. 2014*. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Bogor: Mitra Wacana Media.

Christina Trimanda. 2013. Pengaruh SPT dan SSP terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Dedy Setya Utama Pandiangan. 2014. *Pengaruh Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.*

Deni Darmawan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.

Ferra Pujianty. 2015. *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan KhususUntuk Perpajakan dan UKM*. Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia.

Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.* Jakarta: Gramedia.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah).* Ghalia Indonesia

Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Lilis Puspitawati. 2013. *Pengaruh Kemampuan Pengguna Informasi Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Dan Implikasinya Pada Kualitas Informasi*. Survey pada KPP Di Kanwil Jawa Barat 1.

Nadian Kusuma. 2015. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Tahun 2008-2014 Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.*

Nanang Martono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder.* Jakarta: Rajawali Pers.

Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat. 2015. *E-Faktur: Mudah dan Cepat.* Jakarta: Visimedia.

Radityo Yughie. 2015. Pengaruh Self Assesment dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Madya Bekasi.

Rimsky K.Judisseno. 2015. *Perpajakan (Edisi Revisi).* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin. 2015. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empatdua Media.

Rizky Yuslam. 2015. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)

Silvia Nurcholivah. 2015. *Pengaruh Self Assesment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Jambi*.

Siti Kurnia Rahayu. 2010 *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Suharsimi Arikanto.2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supramono & Theresia. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Supriyati. 2011. *Metodologi Penelitian.*Bandung: Labkat Press.

Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.

Tony Wijaya. 2013. Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Uma Sekaran. *2011*. *Research Methods for business Edisi 1 and 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Untung Sukardji. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai (Edisi Revisi 2015)*. Jakarta : Rajawali Pers

Yessy Izzatun Rizky. 2014. *Pengaruh PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT MASA PPN, STP PPN,dan Inflasi, Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*.

Yustinus Prastowo, Agus Priyatna dan Yosep E. Nugraha. 2011. *Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha dan Peristiwa Khusus.* Jakarta: Raih Asa Sukses.